

Judul : Pengelola kawasan konservasi butuh komitmen kuat
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Pengelolaan Kawasan Konservasi Butuh Komitmen Kuat

Indonesia memiliki seluas 28 juta hektare kawasan konservasi. Namun, berdasarkan data dari World Resources Institute, sebagian besar pusat keanekaragaman hayati dikendalikan masyarakat.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

PENGELOLAAN kawasan konservasi terhadap sejumlah kendala. Akibatnya, upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati tidak maksimal. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut bahkan untuk pengelolaan kawasan konservasi seluas satu hektare, anggaran hanya diberikan sebesar Rp5.000/tahun.

"Bagaimana menjaga hutan konservasi dan lain-lain kalau dananya enggak ada. Omong kosong itu semua," ucap Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV ber-

sama akademisi, kemarin.

Sudin membeberkan untuk pengelolaan hutan lindung, semua kewenangan dan pendanaan dilimpahkan kepada provinsi. Ia memberikan contoh pengelolaan hutan lindung di Lampung. Per tahunnya, dana APBD yang digelontorkan untuk upaya perlindungan hutan Rp0 alias nihil.

Selain minimnya pendanaan, Sudin mengkritisi lemahnya penegakan hukum yang dilakukan di wilayah konservasi. "Di Batam, taman burung sekian ratus hektare diduduki berpuluh-puluh tahun, tapi pejabat diam saja. Tolong para akademisi bantu kami karena kalau kami bicara sanksi ini

sekeras-kerasnya," ujar politikus PDIP itu.

Luar kawasan

Saat ini pemerintah dan DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). Pada kesempatan yang sama, Rinekso Soekmadi dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyoroti upaya konservasi di luar kawasan konservasi.

"Karena kawasan konservasi yang ada belum mampu melindungi seluruh spesies. Meskipun cukup efektif dalam penurunan laju kerusakan habitat daripada kawasan yang tidak dilindungi," kata Rinekso.

Berdasarkan data yang diterimanya, Indonesia memiliki seluas 28 juta hektare kawasan konservasi. Namun, Rinekso membeberkan, berdasarkan data dari World Resources Institute, sebagian besar pusat

keanekaragaman hayati justru dikendalikan masyarakat.

Di Indonesia, ada 105 juta spot ekosistem penting sebagai penyangga dan penghubung wilayah terestrial. Selain itu, berdasarkan data yang diakses di Key Biodiversity Area (KBA) di Indonesia, sebanyak 500 wilayah yang termasuk KBA dengan luas 344 ribu kilometer persegi.

"Lebih dari 50% KBA ada di luar kawasan konservasi. Hanya 5% KBA yang ada seluruhnya di kawasan konservasi. Jadi, kalau kita hanya fokus pada kawasan konservasi kita hanya baru melestarikan yang 5%. Karenanya, konservasi di luar kawasan konservasi adalah sebuah keniscayaan," tandasnya.

Alasan lain soal pentingnya melakukan konservasi di luar kawasan konservasi ialah berdasarkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) sebanyak 85% gajah sumatra dan kalimantan berada di luar kawasan konservasi.

Situasi yang sama juga terjadi pada 75% orang utan liar.

"Takta lainnya ialah konflik antara satwa dan manusia dari waktu ke waktu cenderung meningkat," imbuhnya.

Rinekso mengakui melakukan konservasi di luar kawasan memang bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah maraknya pembangunan. Namun, ada sejumlah kaidah yang dapat diimplementasikan, di antaranya meminimalisasi dampak saat melakukan pembangunan.

"Dalam konteks keruangan, kawasan konservasi dapat berada di hutan konservasi ataupun selainnya, seperti hutan produksi, hutan lindung, dan APL sejauh ditetapkan pemerintah pusat," jelas Rinekso.

Ia juga menekankan dalam mengembangkan area konservasi di luar kawasan konservasi butuh pendekatan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pelibatan para pihak harus diakomodasikan lebih proporsional melalui skema insentif yang jelas dan *benefit sharing* yang adil. (H-3)